

**“PENINGKATAN MUTU PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU DALAM
PENGEMBANGAN APLIKASI VENDOR MANAJEMEN SISTEM (VMS) DI RS VERTIKAL
RSAB HARAPAN KITA ”**

Disusun Oleh:

Nama : Efvi Miaristi, ST., MM
Instansi : RSAB Harapan Kita

RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2024

A. RINGKASAN

1. Latar Belakang

RSAB Harapan Kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak dan bunda, bertekad menyelenggarakan pelayanan yang unggul, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak dengan manajemen yang transparan dan akuntabel. RSAB Harapan Kita sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan RI dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang kesehatan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, perlu mengimplementasikan Good Corporate Governance, sebagai kebijakan sosial-politik untuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

RSAB Harapan Kita merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berkomitmen pada keselamatan pasien, pengunjung, dan stafnya. Dalam memberikan *service excellent* kepada pasien salah satunya dengan melaksanakan pemenuhan sarana prasarana dan alat melalui proses pengadaan barang dan jasa. Rumah sakit wajib memberikan kepuasan kepada pasien,

Proses pengadaan B/J dalam pemenuhan SPA didapatkan dari penyedia UMKM yang sudah berkontrak dengan RSAB Harapan Kita, sepanjang masa tahun 2022 sampai 2023 hasil pekerjaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh penyedia UMKM tidak berkualitas, sering kali saat manajemen melaksanakan ronde ditemukan dilapangan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan terkesan yang penting pekerjaan selesai sesuai kontrak.

Manajemen RSAB Harapan Kita melihat problematika ini dan harus dilakukan perubahan perbaikan. RSAB Harapan Kita mengalami kerugian baik segi waktu yang seharusnya bisa melayani masyarakat menjadi idle dan kehilangan pendapatan karena ruangan idle tidak bisa digunakan serta barang yang diperbaiki oleh penyedia UMKM tidak mempunyai kualitas yang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu ditindaklanjutinya proses penilaian kinerja penyedia secara objektif, saat ini penilaian kinerja penyedia UMKM sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 17 Bahwa penilaian penyedia dilakukan dari kegiatan pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah/ volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan dan sesuai

dengan Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 penilaian penyedia yang dilakukan secara aspek indikator, dan bobot untuk penilaian kinerja penyedia. Penilaian penyedia yang ada sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 dilaksanakan oleh PPK melalui SIKAP.

Aspek penilaian sesuai peraturan tersebut merupakan penilaian yang baku dikarenakan terdapat banyak faktor lainnya yang terkait, sehingga perlu dilakukannya penyesuaian instrument penilaian kinerja penyedia yang disesuaikan dengan karakteristik dan ruang lingkup pekerjaannya, salah satu faktor penilaian yang belum mengakomodir penilaian penyedia adalah aspek financial, penilaian aspek financial yang dilakukan oleh Bank Mitra dan RSAB Harapan Kita.

Penilaian ini dimaksudkan agar RSAB Harapan Kita dapat mengontrol, mengidentifikasi sumber kegagalan, pencegahan sumber kegagalan dan efisien serta efektifitas saat akan mengadakan pengadaan barang / jasa selanjutnya.

Ketidak tersediaan proses penilaian kinerja yang dibutuhkan saat ini, membuat RSAB Harapan Kita berfikir secara "*out of the wall*" yaitu beri inovasi untuk membuat adanya *tools* berupa aplikasi penilaian kinerja penyedia. Output yang diharapkan manajemen RSAB Harapan Kita adalah penilaian kinerja penyedia terlaksana akan didapatkan penyedia yang berkinerja baik dan selanjutnya penyedia tersebut dapat dimasukkan sebagai penyedia terundang untuk pekerjaan/ kontrak yang baru melalui metode pengadaan langsung.

B. TUJUAN ATAU TARGET SPESIFIK YANG DILAKSANAKAN DAPAT TERBAGI MENJADI TIGA, YAITU:

a. Tujuan Jangka Pendek

Tersusunnya Peraturan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pedoman Pengadaan B/J BLU di RSAB Harapan Kita.

b. Tujuan Jangka Menengah.

Tersedianya Business Requirement Development (BRD) Master Data untuk Pengembangan Aplikasi Vendor Manajemen Sistem (VMS) Pengadaan Langsung B/J BLU di RSAB Harapan Kita.

c. Tujuan Jangka Panjang

Terwujudnya Integrasi data penyedia Vendor Management System (VMS) untuk pengadaan langsung di RSAB Harapan Kita dan RS Vertikal di Kementrian Kesehatan.

2. Manfaat

Aksi perubahan yang dilakukan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

a. Manfaat bagi RSAB Harapan Kita

- 1) Peningkatan capaian target pendapatan dan kemandirian financial RSAB Harapan Kita;
- 2) Peningkatkan mutu layanan RSAB Harapan Kita;
- 3) Peningkatan kepuasan *stakeholder* internal dan eksternal.

b. Manfaat bagi pelanggan

- 1) Diperolehnya fasilitas pendukung sarana prasarana alat (SPA) yang sesuai best practice;
- 2) Diperolehnya *excellent service* pada *customer experience*.

c. Manfaat bagi Kementerian Kesehatan

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dapat terlaksana secara optimal;
- 2) BLU Rumah Sakit menggunakan anggaran mandiri sehingga RM dapat dialihkan ke program Kesehatan masyarakat daerah yang membutuhkan.

C. LATAR BELAKANG

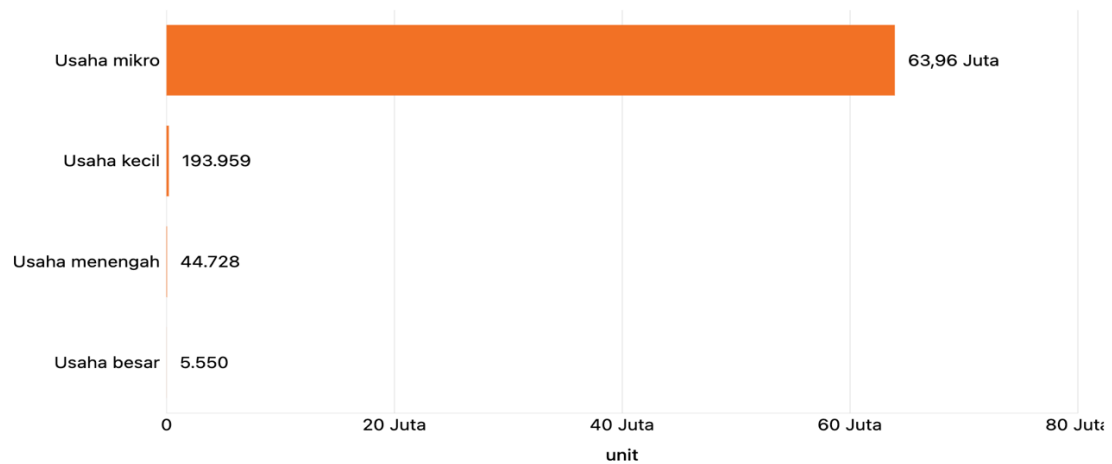
1. Identifikasi Isu

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu sumber hukum tertulis di Indonesia, Bagian kesatu Peran serta Usaha Kecil dan Koperasi pada pasal 65, peningkatan pagu anggaran dari yang tadinya hanya sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp15.000.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) yang ditujukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Peningkatan yang sangat drastis tersebut akan semakin menguntungkan para pelaku usaha di Indonesia yang juga akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi. Disinilah diperlukannya Analisis Perubahan Kebijakan Usaha Mikro, Koperasi berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terjadi perubahan kebijakan pada pasal 65 yang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam implementasi dilapangan.

Pemerintah sangat memikirkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia dengan banyaknya upaya yang dikerahkan, salah satunya dengan memajukan dan mengembangkan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pembentukan usaha UMKM menjadi salah satu solusi dalam mencetak lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja warga negara Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan ada 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam acara Debat Capres-Cawapres 2024 seri kedua bertema "Ekonomi, Keuangan, Investasi, Pajak, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan" di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023). Dari data tabel dibawah menunjukkan UMKM memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat.

Tabel 3. Data Penyedia Berdasarkan Kelas

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM di Indonesia Berdasarkan Kelasnya (2021)



Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib mengupayakan kemajuan ekonomi dengan mendukung UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam implementasinya inilah tantangan pemerintah dalam mencari solusi dalam menghadapi hambatan terkait pengadaan barang/ jasa yang melibatkan UMKM sebagai penyedia barang/ jasa, salah satunya **ketidakpercayaan konsumen terhadap hasil kualitas produk barang/ jasa** dari Penyedia UMKM dan kendala modal usaha yang cenderung bersumber dari modal sendiri yang tidak mumpuni, peminjaman SPK/ Kontrak berjalan ke Bank – Bank dan kecenderungan menjadi penyedia “apa lu mau gua ada” atau Palugada sehingga terkesan Penyedia UMKM sebagai Broker dan menjadi tempat yang dapat meminjamkan bendera kepada penyedia lainnya.

Berikut ini salah satu berita dari banyaknya kejadian- kejadian kasus penyelewengan yang di akibatkan oleh penyedia UMKM yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan tanpa memikirkan bahwa merugikan negara menjadi dampaknya :

1. Kasus Pengadaan APD di Kementrian Kesehatan saat pandemi Covid- 19 dengan kerugian negara sebanyak 625 Milyar

Covid-19, KPK Periksa Komut dan Dirut PT Permana Putra Mandiri

Kamis, 14 Maret 2024 - 14:00 WIB



Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra pada Kamis (14/3). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra pada Kamis (14/3).

Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat pandemi Covid-19.

Selain Siti, KPK juga memanggil Dirut PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik.



Selain itu, ada laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa APD yang dibeli itu kemahalan. Dalam hasil audit Nomor 01 Gugus/PW/02/05/2020 pada 20 Mei 2020, BPKP mencatat kelebihan harga APD yang dipasok PT PPM dan PT EKI sebesar Rp 625 miliar. BPKP juga mendapati, PT EKI tidak memiliki izin penyalur alat kesehatan (IPAK), bukan pengusaha kena pajak, dan memonopoli usaha dengan mengharuskan PT PPM hanya membeli barang dari PT EKI, yang melanggar undang-undang.

Penyedia tidak memenuhi persyaratan

Kepada **detikX**, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP Wawan Yulianto membenarkan temuan tersebut.

"Semua hasil pengawasan BPKP telah diserahkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," tulis Wawan melalui pesan singkat pada Selasa, 14 November 2023.

Dalam perkembangannya, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggal LKPP Setya Budi Arijanta juga menyurati Budi Sylvana, memintanya memutus kontrak dengan PT PPM dan PT EKI secara sepihak. Ada sejumlah alasan menurut dokumen surat tertanggal 17 Januari 2022 yang didapat oleh **detikX** tersebut.

Pertama, PT EKI, yang tidak memiliki IPAK, malah dominan menentukan harga pada saat penawaran harga seharusnya dilakukan dengan penyedia yang memiliki IPAK. Kedua, kontrak itu cacat karena tidak mencantumkan sumber dana, batas akhir berlakunya kontrak, dan jadwal tahapan pengiriman APD. Ketiga, kontrak juga dinilai cacat karena ditandatangani PT EKI, yang tidak mempunyai IPAK.

Donal tidak setuju jika dikatakan ada pemutusan kontrak. "Tidak ada pembatalan sama sekali. Dan akhirnya terbukti (tidak batal) kan di persidangan. Justru klien saya yang rugi," ungkapnya.

Berdasarkan putusan 22 Juni 2023, PN Jaksel menyatakan surat pesanan APD sah sepanjang berkaitan dengan posisi PT PPM sebagai penyedia dan Budi Sylvana sebagai penerima pesanan. Kemudian dituntut membayar 1,2 miliar APD dengan dasar D.

Gambar 3. Kasus Pengadaan APD di Kementerian Kesehatan

2. Kasus Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik UNAIR dengan kerugian Negara sebanyak 14,139 Milyar

Terkait vonis tersebut, Bambang dan jaksa KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari, sementara Minarsih menerima.

Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Unair telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 14,139 miliar.

Selain Bambang dan Minarsih, kasus ini juga menjerat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemenkes Zulkarnain Kasim dan M Nazaruddin selaku pemilik serta pengendali Anugrah Permai Grup.

Bambang disebut mendapat keuntungan sebesar 7.500 dolar AS atau Rp 100 juta dan Zulkarnain sebesar 9.500 dolar AS.

Baca juga: Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kemudian, Bantu Marpaung sebesar Rp 154 juta dan Ellisnawaty sebesar Rp 100 juta, serta memperkaya korporasi Anugrah Permai Grup sebesar Rp 13,681 miliar.

Bantu Marpaung merupakan pemilik PT Buana Ramosari Gemilang yang memenangkan tender pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium tahap I.

Padahal, PT Buana Ramosari Gemilang hanya dipinjam benderanya oleh Anugrah Permai Grup dengan imbalan Rp 154 juta.

PT Buana Ramosari Gemilang mendapatkan pembayaran sejumlah Rp 34,77 miliar meski pekerjaan belum selesai 100 persen hingga batas waktu penyelesaian pada 31 Desember 2010. Sebab, alat kesehatan baru dikirim pada Januari 2011.

Keseluruhan uang pembayaran alat laboratorium ke PT Buana Ramosari Gemilang itu dikuasai oleh Anugrah Permai Grup.

Padahal, PT Buana Ramosari Gemilang hanya dipinjam benderanya oleh Anugrah Permai Grup dengan imbalan Rp 154 juta.

PT Buana Ramosari Gemilang mendapatkan pembayaran sejumlah Rp 34,77 miliar meski pekerjaan belum selesai 100 persen hingga batas waktu penyelesaian pada 31 Desember 2010. Sebab, alat kesehatan baru dikirim pada Januari 2011.

Keseluruhan uang pembayaran alat laboratorium ke PT Buana Ramosari Gemilang itu dikuasai oleh Anugrah Permai Grup.

Baca juga: Dokter Tersangka Kasus Suap Pengadaan Alkes Covid-19 Jadi Tahanan Kota

Setelah itu, pada pengadaan alat kesehatan dan laboratorium tahap II dimenangkan oleh PT Marell Mandiri yang dimiliki oleh Ellisnawaty.

Namun, PT Marell Mandiri ternyata hanya dipinjam benderanya oleh Anugrah Permai Grup dengan imbalan Rp 100 juta.

Pembayaran alat kesehatan itu sebesar Rp 44,018 miliar dan seluruhnya dikuasai oleh Anugrah Permai Grup.

Diketahui Anugrah Permai Grup hanya membayar vendor pengadaan alat kesehatan tahap I sebesar Rp 28.492 miliar, maka terdapat selisih Rp 6,277 miliar.

Pada tahap II, Anugrah Permai Grup hanya membeli alat kesehatan senilai Rp 36,157 miliar, maka ada selisih Rp 7,861 miliar.

Penyedia = broker



Gambar 4. Kasus Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik UNAIR

Berikut ini salah satu data kejadian yang di akibatkan oleh penyedia UMKM yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan tanpa memikirkan bahwa merugikan negara, RSAB Harapan Kita dan masyarakat menjadi dampaknya:

Tabel 4. Data Blacklist Penyedia UMKM di RSAB Harapan Kita

No	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak	Tahun
1	PT. TIGADOLOK CIPTA KARYA	Pembangunan Jembatan Penghubung antara Gedung Annex ke Gedung Administrasi Lantai 3	Rp 284,896,283.01	2022
2	CV. FRIMA JAYA	Renovasi Gedung Utama Lantai 4 Untuk Klips (Klinik Perempuan Sehat)	Rp 6,935,945,709.00	2022
3	PT. TIOMIN ANUGRAH MULIA	Renovasi Gedung Administrasi Lantai 5 RSAB Harapan Kita	Rp 2,922,945,403.00	2022
4	PT. SANGKURIANG JAYA ABADI	Pengadaan Cetakan umum dan Medik RSAB Harapan Kita Tahun 2022	Rp 419,087,160.00	2022
5	CV. RUCITA JAYA	Pengadaan Suku Cadang Peralatan Sarana IPSRS Tahap 1 Tahun 2023 RSAB Harapan Kita	Rp 254,810,689.00	2023
6	CV. SEPUH PERKASA	Pengadaan Suku Cadang Peralatan Sarana IPSRS Tahap I tahun 2023	Rp 255,254,549.00	2023
7	CV. DIMENSI CIPTA SARANA	Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Lanjutan Gedung Utama Lantai 4 Ruang KLIPS RSAB Harapan Kita Tahun 2023	Rp 4,935,411,882.00	2023

Berdasarkan hasil taking ownership yang melibatkan Direktur Utama, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian selaku Mentor PKA, Direktur Keuangan, Kepala Unit Layanan Pengadaan, Anggota ULP diketahui bahwa semua bagian telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Namun demikian, ada beberapa masalah yang dibahas yaitu:

Indikator Kinerja Utama dan Tugas Fungsi Pemimpin Administrator	Kondisi Saat Ini	Kondisi Seharusnya	GAP
a. Presentasi pemenuhan SPA Rumah Sakit UPT Vertikal sesuai standar 1. Melaksanakan pengadaan B/J RSAB Harapan Kita	Hasil pekerjaan Penyedia UMKM tidak berkualitas	Hasil Pekerjaan penyedia UMKM harus sesuai standar yang dipersyaratkan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Ada Revisi Terbaru Pedoman Pengadaan B/J BLU RSAB HK • Belum ada nya Aplikasi penilaian kinerja penyedia • Pelaksana penyedia tidak sesuai tenaga ahli di KAK • Penyedia Pinjam Bendera • Penyedia Tidak kompeten • Penyedia tidak punya modal

2. Pemenuhan SPA di RSAB Harapan Kita	Tidak tersedianya hospital kits untuk rawat jalan amarylis klips	Tersedianya hospital kits untuk pasien rawat jalan Amarylis	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia Broker • Penyedia Prinsipal bukan distributor • Distributor tidak mempunyai izin SIUP ART
	Tidak tersedianya Baju kerja untuk perawat dan front liner rawat jalan Amarylis klips	Tersedianya baju kerja sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya konsep baju • Belum tersedianya anggaran baju kerja

Tabel 5. Identifikasi Isu

- a. Kualitas hasil pekerjaan tidak optimal yang dilaksanakan penyedia spesifikasi dilaksanakan tetapi pelaksana pekerjaan bukanlah orang yang belum mempunyai kompetensi dibidangnya
- b. Keterlambatan pekerjaan dengan waktu masa pelaksanaan pekerjaan yang sudah habis dikarenakan penyedia tidak mempunyai modal untuk membayar tukang ataupun membeli barang yang ada di SPK
- c. Penyedia menggunakan uang muka untuk pekerjaan diluar RSABHK sehingga uang muka yang harusnya dibuat membayar jasa tukang pelaksana dan bahan bangunan tidak bisa disediakan
- d. Penyedia mengambil barang ke Distributor tetapi belum membayar distributor dan tidak bertanggung jawab padahal RSABHK sudah membayar full penyelesaian pekerjaan.

Berikut ini Dokumentasi pelaksanaan *taking ownership* kepemilikan bersama masalah yang akan diselesaikan oleh peserta dan mendapat dukungan dari mentor dan tim kerja di RSAB Harapan Kita Jakarta untuk penetapan isu atau masalah prioritas.



Gambar 5. Pelaksanaan *Taking Ownership* di RSAB Harapan Kita

2. Penetapan Isu Prioritas

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ada, maka perlu ditentukan prioritas masalah. Metode manajemen yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, and Growth*). Dengan metode USG, ditentukan tingkat urgensi (kemendesakan waktu), keseriusan (dampak terhadap organisasi jika masalah tidak segera diatasi), dan perkembangan isu (penyebaran masalah jika tidak segera diatasi). Metode USG ini merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas isu atau masalah dengan 10 skoring 1-5, nilai terendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 5.

Analisis USG pada isu-isu tersebut terdapat pada 11able di bawah ini.

Tabel 6. Urgency, Seriousness, Growth

NO	PERMASALAHAN	U	S	G	TOTAL	RANKING
1	Hasil penyedia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak berkualitas.	5	5	5	15	1
2	Tidak tersedianya hospital kits untuk rawat jalan amarylis klips	4	4	4	12	3
3	Tidak tersedianya Baju kerja untuk perawat dan front liner rawat jalan Amarylis klips	4	4	5	13	2

Berdasarkan identifikasi masalah utama melalui taking ownership dan analisis USG yang telah dilakukan, untuk menyelesaikan pedoman pengadaan B/J BLU RSAB Harapan Kita dan hasil identifikasi merupakan kondisi yang menghambat kinerja pelayanan di RSAB Harapan Kita sehingga arahan dari pimpinan issue permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan yaitu **Hasil penyedia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak berkualitas.**

Peningkatan angka gagal menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, menghambat proses pengadaan Barang dan Jasa yang berimbas pada pemenuhan kebutuhan pelayanan RSAB Harapan Kita. Dalam pengadaan jasa konstruksi renovasi gedung utama lantai 4 untuk Klips RSAB Harapan Kita, dikarenakan Penyedia UMKM tidak mempunyai modal yang cukup membuat RSAB Harapan Kita mengalami kerugian baik dari waktu, pendapatan dan kesehatan masyarakat:

YEARS	PATIENS		
COMPONENT	TIME	MONEY	CUSTOMER SATISFACTION
2022	Tidak ada pelayanan 365 hari = 0 pasien	Rp -	idle = 0%
2023	Tidak ada pelayanan 365 hari = 0 pasien	Rp -	idle = 0%
2024	Operasional Melayani Pasien tanggal 6 mei 2024 sd 19 mei 2024 = 110 pasien	Rp 48,274.000,-	Pengambilan data di SMT II

Tabel 7. Data Kerugian RSAB Harapan Kita

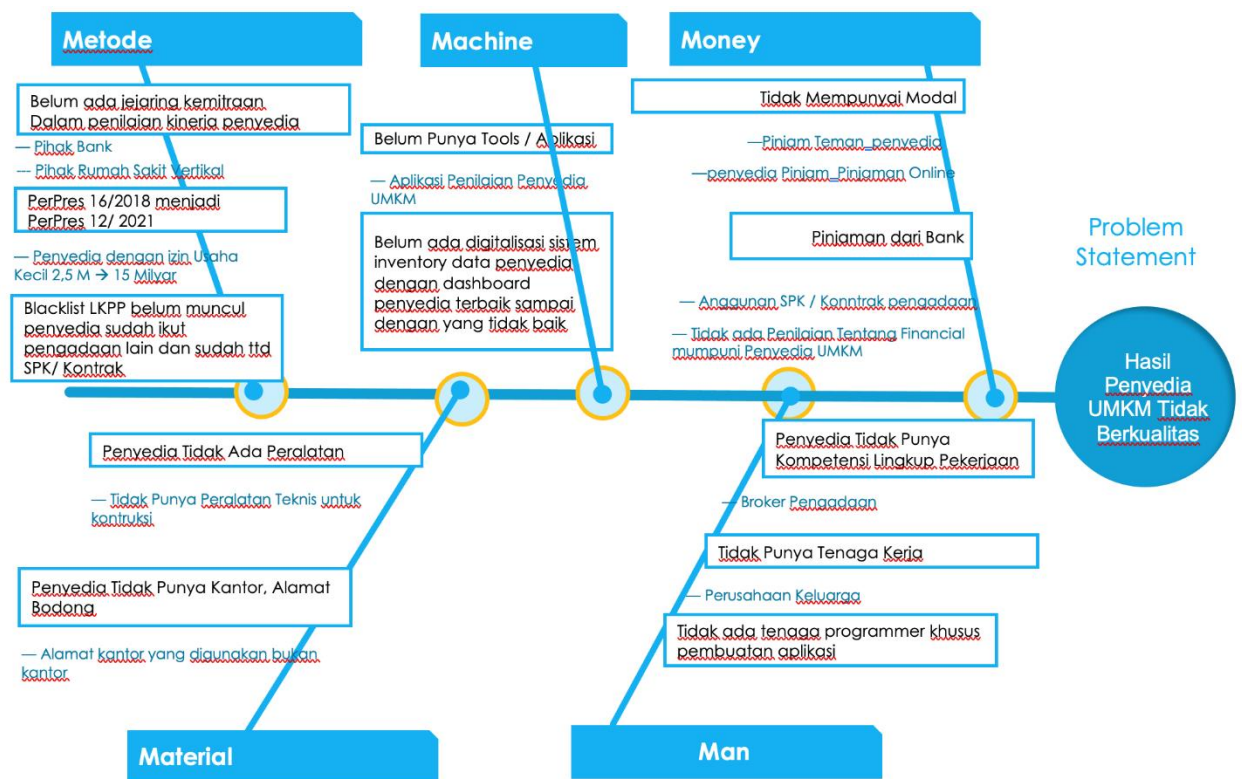
3. Dampak Permasalahan

Kondisi-kondisi diatas, jika tidak segera diatasi maka akan menyebabkan terjadinya beberapa dampak sebagai berikut :

- Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan ibu dan anak dikarenakan bangunan KDP (Konstruksi dalam pengerjaan);
- Downtime untuk pelayanan yang diakibatkan waktu penyelesaian pekerjaan yang terlambat; dan
- Kerugian pendapatan pelayanan di RSAB Harapan Kita yang diakibatkan konstruksi yang belum selesai.

4. Analisa Penyebab Masalah

Analisa penyebab masalah sangat diperlukan untuk dapat dijadikan dasar pemilihan solusi penyelesaian masalah tersebut. Untuk itu, berikut disajikan analisa penyebab masalah menggunakan metode *fish bone analysis*.



Gambar 6. Fishbone analysis penyebab masalah

Berdasarkan pemetaan penyebab masalah di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan penentuan solusi untuk setiap permasalahan yang muncul. Adapun pemetaan solusi permasalahan tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Matriks Pemetaan Solusi Permasalahan

No.	Penyebab Masalah	Alternatif Solusi
1	<i>Man</i>	
	a. Calon Penyedia UMKM tidak memiliki kompetensi lingkup pekerjaan yang di tenderkan sehingga penyedia hanya sebagai broker pengadaan	a. Melakukan penilaian Kinerja terhadap kinerja calon penyedia dari history pekerjaan yang sudah selesai
	b. Calon penyedia perusahaan UMKM keluarga dan tidak punya tenaga kerja	b. Melakukan penilaian Persyaratan Teknis dan Kualifikasi terhadap calon penyedia dan pengecekan surat pajak tahunan pekerjanya
	c. Tidak ada tenaga programmer khusus terkait pembuatan Aplikasi Pengadaan	c. Membina jejaring kemitraan pembuatan Aplikasi VMS dengan Bank Mitra
2	<i>Money</i>	
	a. Calon penyedia tidak mempunyai modal usaha sehingga nekad meminjam sesama penyedia sampai dengan meminjam dengan cara pinjaman online	a. Melaksanakan penilaian kinerja penyedia secara keamanan keuangan perusahaan penyedia di lihat dari history pekerjaan dengan menggunakan form penilaian PPK dan di inaproc untuk daftar blacklist penyedia
	b. Calon penyedia tidak mempunyai modal usaha sehingga meminjam dari bank dengan SPK / Kontrak pekerjaan yang akan laksanakan sebagai anggunan ke bank	b. Melaksanakan penilaian kinerja penyedia secara keamanan keuangan perusahaan penyedia di lihat dari history pekerjaan di Aplikasi VMS
3	<i>Metode</i>	
	a. Belum ada jejaring kemitraan dalam penilaian kinerja dengan pihak Bank	Kolaborasi dengan Bank Mitra dengan MOU untuk pembuatan Aplikasi VMS
	b. Belum ada jejaring kemitraan dalam penilaian kinerja dengan sesama RS Vertikal di Kemenkes	Kolaborasi dengan RS Vertikal dengan mengadakan pertemuan setelah Aplikasi VMS sudah ada
	c. Adanya perubahan nilai paket pengadaan B/J pada Perpres 16/2018 paling banyak Rp.2,5 M pada	Membuat Pedoman Pengadaan BLU RSAB Harapan Kita dengan mengacu selain Pepres 12/ 2021 juga mengacu peraturan PMK RI No. 202/ PMK.05/2022

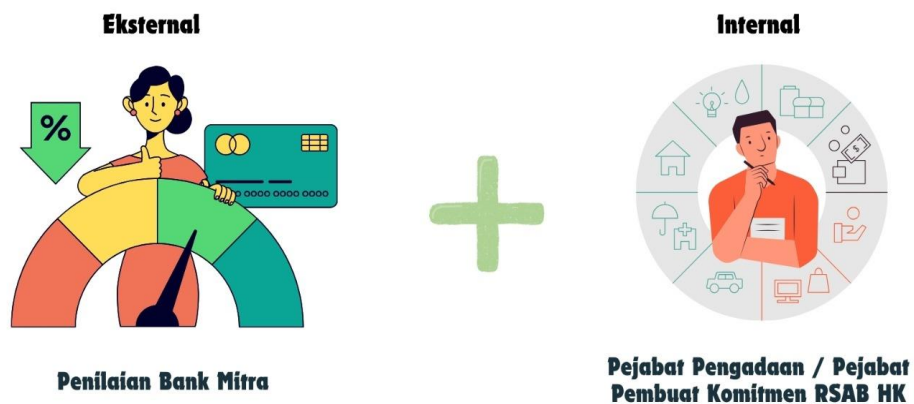
No.	Penyebab Masalah	Alternatif Solusi
	Perpres 12/ 2021 paling banyak menjadi Rp. 15 M	
4	<i>Machine</i>	
	a. RSAB Harapan Kita belum mempunyai Aplikasi VMS	a. Membina jejaring kemitraan pembuatan Aplikasi VMS dengan Bank Mitra
	b. Belum ada Aplikasi Inventory tentang data Penyedia dengan kinerja baik dan kinerja tidak baik	b. Membina jejaring kemitraan pembuatan Aplikasi VMS dengan Bank Mitra
5	<i>Material</i>	
	a. Calon Penyedia tidak mempunyai peralatan kerja untuk pekerjaan konstruksi	a. Melaksanakan penilaian kinerja penyedia secara penilaian kepunyaan Aset tetap dan Aset tidak tetap perusahaan penyedia di lihat dari history pekerjaan di Aplikasi VMS,
	b. Calon Penyedia tidak mempunyai kantor dan alamat nya bukan perkantoran tapi rumah	b. Melaksanakan monev pengadaan B/J dan penilaian kinerja penyedia oleh unit layanan pengadaan

D. LANGKAH - LANGKAH

1. Terobosan/ Inovasi

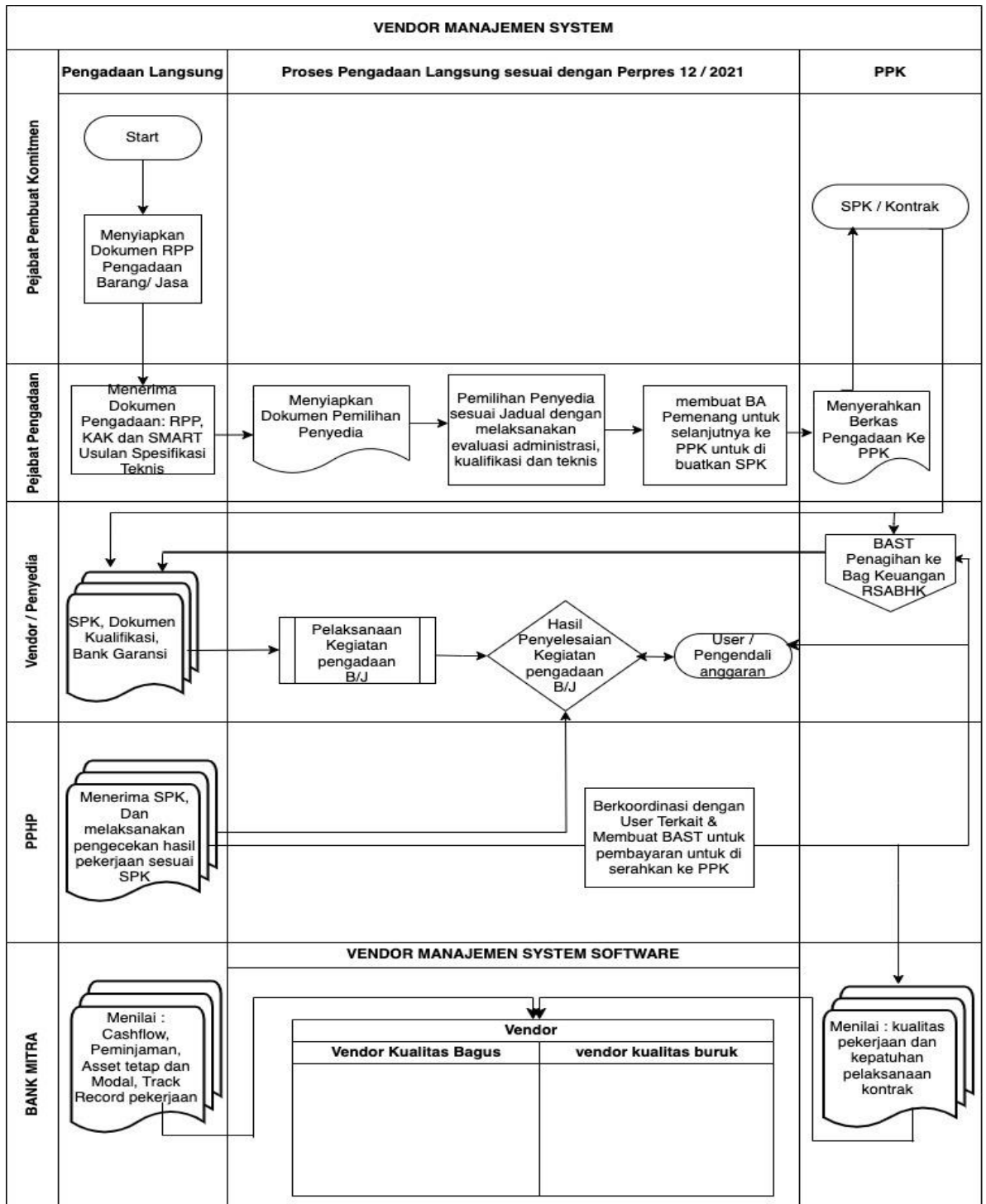
Berikut ini gambaran singkat proses penyediaan vendor di RSAB Harapan Kita sebelum dan sesudah perubahan.

VENDOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS) RSAB



Gambar 7. Penilaian Pihak Bank Mitra dan RSAB Harapan Kita

Gambar 8. Flowchart Pengadaan B/J dengan BRD Aplikasi VMS



Gambar 9. Keadaan Eksisting Pengadaan Langsung



Gambar 10. Kondisi Perubahan Proses Pengadaan Langsung



2. Tahapan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pengembangan digitalisasi penilaian calon penyedia berbasis sistem aplikasi VMS untuk pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di RSAB Harapan Kita maka dilakukan pentahapan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Tahapan Kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu	Output
1.	Jangka Pendek	Tujuan: Tersusunnya Bisnis Proses Alur Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pedoman Pengadaan B/J BLU di RSAB Harapan Kita.		

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu	Output
a	Persiapan	Membentuk tim efektif	Minggu ke-1 Juli 2024	SK Tim Efektif
		Melakukan Koordinasi dengan Kepala ULP dan Tim Pengadaan serta tim efektif	Minggu ke-2 sd minggu ke 4 juli 2024	Kepala ULP dan Tim memberikan masukan dari identifikasi masalah pengadaan B/J dan sosialisasi tusi tim efektif dan tujuan aksi perubahan
b	Pelaksanaan	Melakukan Identifikasi output informasi permasalahan pengadaan B/J	Minggu ke-2 sampai ke-4 Juli 2024	Data rekap blacklist dari INAPROC untuk pekerjaan di Kemenkes dan di RSAB HK
		Menyusun draft Proses Bisnis Alur Pengadaan Pedoman Pengadaan B/J BLU	Minggu ke-2 sampai ke-4 Juli 2024	Draft Proses Bisnis Alur Pengadaan Pedoman Pengadaan B/J BLU
		Menyusun draft Pedoman Pengadaan B/J BLU	Minggu ke-2 sampai ke-4 Juli 2024	Draft Pedoman Pengadaan B/J BLU
		Melakukan pembahasan dengan Direktur Utama, Direktur Keuangan, Mentor tentang Pedoman B/J BLU	Minggu ke-2 sampai ke-4 Juli 2024	Draft Pedoman Pengadaan B/J BLU
		Melakukan pembahasan (<i>kickoff</i>) dengan ULP, Sekretariat, Pejabat Pengadaan tentang Pedoman B/J BLU	Minggu ke-2 sampai ke-4 Juli 2024	Draft Pedoman Pengadaan B/J BLU
		Melaksanakan penetapan surat keputusan dan surat edaran pemberlakuan Pedoman Pengadaan B/J BLU dari Direktur RSAB Harapan Kita	Minggu ke-2 sampai ke-4 Juli 2024	SK Penetapan, Surat Edaran dan Pedoman Pengadaan B/J BLU

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu	Output
		Melakukan sosialisasi pedoman ke seluruh stake holder terkait	Juli sampai dengan Agustus 2024	Adanya pemahaman dari stakeholder terkait internal dan eksternal
		Melakukan Pengembangan kompetensi untuk aksi perubahan sesuai dengan rencana Pengembangan kompetensi yang sudah di susun dalam RAP menggunakan metode Mentoring, coaching, bimbingan teknis dan sosialisasi	Juli sampai dengan Agustus 2024	
c	Evaluasi	Melakukan Rekonsiliasi Penerapan Pedoman Pengadaan B/J BLU di RSAB Harapan Kita	Agustus 2024	Rekonsiliasi
2. Jangka Menengah				
Tujuan: Tersedianya Business Requirement Development (BRD) untuk Pengembangan Aplikasi Vendor Manajemen Sistem (VMS) Pengadaan Langsung B/J BLU di RSAB Harapan Kita.				
a	Persiapan	Melakukan Penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan jangka pendek	Agustus 2024	Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan jangka pendek
b	Pelaksanaan	Melakukan Pembahasan BRD aplikasi VMS dengan seluruh tim efektif dan penjadualan sosialisasi	Agustus – Oktober 2024	Pertemuan dengan bank mitra untuk presentasi VMS dan penjelasan Aplikasi VMS
		Melakukan Penyempurnaan Business Requirement Development aplikasi VMS Rapat dengan Tim Efektif untuk Sosialisasi tentang BRD Aplikasi VMS	Agustus – Oktober 2024	Business Requirement Development Final
		Melakukan Desiminasi BRD Pengadaan BLU B/J RSAB Harapan Kita	November 2024	Pedoman Pengadaan B/J BLU RSAB Harapan Kita
3. Jangka Panjang				

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu	Output
Tujuan: Terwujudnya Integrasi data penyedia Vendor Management System (VMS) untuk pengadaan langsung di RSAB Harapan Kita.				
a	Desk spesifikasi, <i>requirement, resource dan develop</i> aplikasi VMS RSAB HK dengan Bank Mitra	Melakukan desk dengan RSAB Harapan Kita untuk finalisasi spesifikasi kebutuhan aplikasi VMS yang dibutuhkan	Desember Tahun 2024	Requirement Development Dokumen, Fuctional Spesifikasi development dan technical spesifikasi development
b	<i>Development Aplikasi VMS</i> oleh Bank Mitra	Melakukan pengembangan Aplikasi VMS (<i>IT development</i>) membuat Aplikasi VMS	Tahun 2025	Aplikasi VMS (Vendor Manajement sistem) launch
c	Desiminasi Penggunaan Aplikasi VMS ke Pejabat Pengadaan RSAB Harapan Kita	Melaksanakan Desiminasi dengan Unit Layanan Pengadaan dan menggunakan aplikasi VMS	Tahun 2025	SOP penggunaan aplikasi VMS
d	<i>Production Issue</i> penggunaan Aplikasi VMS	Melaksanakan uji coba , Penerapan aplikasi dan pemeliharaan VMS	Tahun 2025	<i>VMS Relaunch ready to use</i>
e	Desiminasi Penggunaan Aplikasi VMS ke RS Vertikal Kemenkes	Melaksanakan Desiminasi dengan semua RS Vertikal untuk desiminasi dan integrasi data penyedia pengguna aplikasi VMS	Tahun 2025	VMS integrasi data dengan bank mitra dan sosialisasi ke RS Vertikal Kemenkes

E. HASIL INOVASI

APLIKASI VENDOR MANAGEMENT SYSTEM

Pengembangan Vendor Management System (VMS) merupakan sistem manajemen layanan pada pengadaan barang dan jasa di RSAB Harapan Kita dalam bentuk kolaborasi (*engagement*) antara RSAB Harapan Kita dengan penyedia UMKM, dan Bank Mitra, yang dapat memberikan informasi tentang kinerja penyedia secara otomatis (kinerja baik/ buruk) sebagai referensi untuk pemilihan penyedia yang akan digunakan pada pengadaan langsung pekerjaan selanjutnya.

VMS digunakan untuk proses penilaian kegiatan pengelolaan vendor mulai dari pengecekan laporan keuangan baik cash flow, laporan modal asset tetap dan asset tidak tetap, history /track record pekerjaan (pemantauan bank garansi dan peminjaman modal saat proyek berlangsung) dan penilaian kepatuhan pengembalian pinjaman dan pelaksanaan bank garansi.

Vendor Management System

Masuk ke Akun Anda

vendor1

7e8fg0 7e8fg0

MASUK

Kemenkes
RSAB Harapan Kita

Database Penyedia
izin Usaha
Akta Penyedia
Manajerial
SDM
Pengalaman Perusahaan

Nama Perusahaan*

Alamat*

Kabupaten/Kota*

Kode Pos*

Bentuk Usaha*

NPWP*

No. Pengukuhan PKP*

Email*

Telepon*

Telepon Seluler*

Website

*Data ini wajib diisi

Deskripsi Singkat Bentuk Usaha*

Bank Rekanan*

Kantor Cabang* Ya Tidak

SIMPAN

Update terakhir tanggal 6 Agustus 2024, 17.47

Database Penyedia **Isin Usaha** Akta Penyedia Manajer/tdl SDM Pengalaman Perusahaan

Nama Perusahaan* Healthcare Solutions

Alamat* Jl. Gajah Saebrata

Kabupaten/Kota* Jakarta Selatan

Kode Pos* 12190

Bentuk Usaha* PT

NPWP* 12.123.478.9-012.190

No. Pengukuran PKP* 123

Email* jakarta@healthcaresolutions.com

Telepon* 021-8978845

Telepon Seluler* 0811234456

Website www.healthcaresolutions.com

*Data ini wajib diisi

Deskripsi Singkat Bentuk Usaha* Masukkan deskripsi singkat bentuk usaha

Bank Rekanan* Bank Mandiri

Nomor Rekening* 1230002450301

Kantor Cabang* Ya Tidak

Alamat Kantor Pusat* Jl. Jend. Soedirman, Jakarta Selatan

Telepon Kantor Pusat* 021-9876546

Email Kantor Pusat* halo@healthcaresolutions.com

Update terakhir tanggal 8 Agustus 2024, 17:47

SIMPAN

Database Penyedia **Isin Usaha** Akta Penyedia Manajer/tdl SDM Pengalaman Perusahaan

Jenis Isin Usaha* Pilih jenis isin usaha yang dimiliki

Berlaku Sampai* Masukkan tanggal selesai berlaku isin usaha Anda

Instansi Pemberi* Pilih instansi yang mengeluarkan isin usaha Anda

Kualifikasi*

+ TAMBAH KLASIFIKASI

*Data ini wajib diisi

Nomor Surat* Masukkan nomor surat dari isin usaha Anda

Kualifikasi* Pilih jenis kualifikasi perusahaan

Dokumen*

Nomor Induk Berusaha & SSU

NPWP

SPT Tahun Terakhir

SIMPAN

Database Penyedia **Isin Usaha** Akta Penyedia Manajer/tdl SDM Pengalaman Perusahaan

Jenis Isin Usaha* Pilih jenis isin usaha yang dimiliki

Berlaku Sampai* Masukkan tanggal selesai berlaku isin usaha Anda

Instansi Pemberi* Pilih instansi yang mengeluarkan isin usaha Anda

Kualifikasi*

+ TAMBAH KLASIFIKASI

Nomor Surat* Masukkan nomor surat dari isin usaha Anda

Kualifikasi* Pilih jenis kualifikasi perusahaan

Dokumen*

Nomor Induk Berusaha & SSU

NPWP

SPT Tahun Terakhir

KBLI 2020

Pilih jenis kualifikasi

+ TAMBAH KLASIFIKASI